

PELEPASAN STIGMA DESA PELACUR DARI DESA DUKUHSETI

Joko J. Prihatmoko¹, Claudia Syarifah², Mar'atu Kholisatul Faizah³

Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

E-mail: jokojprihatmoko@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pelepasan label dan stigma desa pelacur dari Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dengan fokus strategi masyarakat menghadapi dan melepaskan stigma. Label dan stigma desa pelacur merusak citra, karakter, dan kepribadian warga, khususnya warga perempuan, remaja, dan anak-anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pendekatan siklus interaktif. Verifikasi data atau interaksi dengan narasumber tetap dilakukan sampai tahap penulisan laporan.

Dari penelitian diketahui pelacuran di Desa Dukuhseti terjadi dan berkembang sejak lama yang dipengaruhi berbagai faktor, seperti budaya, sistem sosial, ekonomi, dan letak geografi. Pelacur dapat dikelompokkan menjadi pekerja seks dan perdagangan seks. Perdagangan seks terjadi karena hegemoni pria atas perempuan dan relasi paternalistik.

Lahirnya stigma negatif karena label yang menyimpang. Pelacuran sempat berkembang tapi tidak semua warga (perempuan) menjadi pelacur dan diuntungkan pelacuran. Label dan stigma desa pelacur menyebabkan diskriminasi dan penarikan jarak terhadap perempuan Dukuhseti, terlebih remaja dan anak-anak. Remaja dan anak-anak mendapat stigma baru sebagai anak haram, anak jadah, dan anak pelacur. Sebagian beradaptasi dengan menyingkir atau merantau ke luar kota.

Pelepasan stigma pada tahap awal dilakukan menutup lokalisasi pelacuran, yang disebut gerakan moralisasi. Gerakan moralisasi berlanjut dengan menutup tempat pelacuran rumahan dan mempersempit akses pelanggan atau penikmat seks dengan pengawasan dan razia rutin. Tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan pemuda melakukan gerakan berkelanjutan dengan melakukan pendekatan dari hati ke hati, dakwah, bimbingan individu dan kelompok, pengajian rutin bagi pelacur, keluarga dan mucikari, dan pemberdayaan dan ekonomi dengan pelatihan berbagai ketrampilan wirausaha. Peran tokoh-tokoh agama (NU), tokoh masyarakat, dan pemuda (Ansor) sangat penting, dengan menggandeng aparat pemerintahan.

Kata Kunci: *Labelling*, stigma, desa pelacur, gerakan moralisasi

Labeling dan Stigma

Teori labeling (*labelling theory*) sering diasosiasikan dengan Howard Becker yang memperkenalkannya tahun 1963.⁴ Teori ini berangkat dari reaksi terhadap perilaku orang sehingga disebut teori reaksi sosial. Teori labeling mengatakan dua hal. *Pertama*, orang berperilaku normal atau tidak normal, tidak

¹ Dosen Fisip Unwahas

² Dosen Fisip Unwahas

³ Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Unwahas

⁴ Becker, Howard. 1963. *Outsiders: Studies in Sociology of Deviance*. New York: The Free Press.

menyimpang atau menyimpang tergantung bagaimana orang lain menilai. Penilaian ditentukan oleh klasifikasi yang terhubung dengan pemikiran orang lain. Apapun yang tidak dianggap masuk kategori baku (*residual*⁵) sebagai standar oleh komunitas secara otomatis ditetapkan sebagai menyimpang (*devian*). *Kedua*, dari waktu ke waktu penilaian berubah sehingga orang yang hari ini dinyatakan sakit dapat dinyatakan sehat (dengan gejala yang sama) beberapa waktu kemudian, atau sebaliknya.

Edwin M. Lamert (1967), dianggap sebagai penemu pendekatan reaksi sosial, menunjukkan bagaimana reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan awal dapat membentuk identitas dan karier dalam penyimpangan dengan membedakan antara perilaku menyimpang primer (*primary deviance*) dan perilaku menyimpang sekunder (*secondary deviance*). Seseorang melakukan tindakan penyimpangan karena pemberian label, julukan, cap, etiket, dan merek. Mula-mula melakukan penyimpangan, yang dinamakan penyimpangan primer. Akibat penyimpangan itu, misalnya mencuri, menipu, dan berselingkuh kemudian penyimpang diberi label sebagai pencuri, penipu, dan pelacur. Sebagai tanggapan atas pemberian label, pelaku penyimpangan primer mendefinisikan diri sebagai penyimpang, mengulangi perbuatan (menyimpang) dan melakukan penyimpangan sekunder sehingga mulai menganut suatu gaya hidup menyimpang (*deviant life style*) yang menghasilkan suatu perilaku menyimpang.⁶

Perilaku menyimpang primer disebabkan oleh berbagai alasan, bisa karena faktor biologis, psikologis, ataupun sosiologis. Sedang perilaku menyimpang sekunder merupakan suatu penerjemahan konsep bertahan, menyerang, dan adaptasi pada masalah yang disebabkan oleh reaksi sosial pada perilaku pertama.⁷

Pemberian label pada individu menyebabkan beberapa kemungkinan, seperti (1) penguatan identitas negatif. Pemberian label membuat individu semakin "terikat" pada label sehingga label menjadi bagian dari identitas diri. (2) stigma dan pengucilan. Pemberian label negatif melahirkan stigma yang menyebabkan individu mengalami penolakan sosial, seperti cemoohan, ejekan, dan pengucilan, sehingga mereka merasa terasing. (3) penurunan harga diri dan percaya diri. Individu yang dilabeli negatif dapat merasa rendah diri, kehilangan kepercayaan diri, dan merasa tidak berharga atau tidak mampu melakukan hal positif. (4) stres dan depresi. Tekanan dari label yang terus-menerus dapat memicu stres, kecemasan, dan depresi. (5) keterbatasan motivasi dan perkembangan. Rasa percaya diri yang rendah dan stigma negatif dapat mengurangi motivasi sehingga menghambat perkembangan kemampuan dan minat individu. (6) meningkatkan perilaku menyimpang. Individu yang dilabeli sebagai penyimpang cenderung akan terus melakukan perilaku yang sama atau bahkan lebih menyimpang, karena mereka mulai meyakini dan menginternalisasi label tersebut.

Meskipun teori labeling berfokus pada individu jika label diberikan pada masyarakat pun dapat memiliki dampak. *Pertama*, pudarnya nilai dan norma. Pemberian label yang salah atau berlebihan dapat merusak atau mengaburkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.⁸ *Kedua*, gangguan keseimbangan sosial. Label yang menyebabkan penolakan dan pengucilan dapat mengganggu stabilitas dan

⁵ Sisa, kekurangan, atau selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh suatu model.

⁶ Sunarto, Kumanto. 2004. *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hal. 179.

⁷ Ahmadi, Dadi dan Nur Aini H, Aliyah. *Teori Penjulukan*. Media.Tor, Vol 6.No.2 Desember 2005
Media.neliti.com/media/publications/156800-ID-teori-penjulukan.pdf

⁸ Arista Candra Irawati; Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; Rampai Jurnal Hukum Volume 1 No 1 April 2022)

keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dan *ketiga*, penciptaan stigma berulang. Jika praktik pelabelan negatif terus terjadi, maka akan melahirkan stigma yang berulang dan meluas dalam masyarakat.

Labeling dan stigma berhubungan secara kausalitas. Labeling adalah proses memberi label atau kategori kepada individu atau kelompok berdasarkan perbedaan tertentu, sedang stigma adalah dampak negatif dari pelabelan tersebut, yaitu penilaian buruk, stereotip, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil yang diberikan kepada individu atau kelompok yang dilabeli. Jadi, labeling merupakan tindakan pemberian label, sedangkan stigma adalah konsekuensi sosial dan emosional yang timbul dari label negatif tersebut. Labeling merupakan komponen penting yang dapat mengarah pada stigma, tetapi tidak semua labeling berujung pada stigma.

Kausalitas hubungan labeling dan stigma itu berjarak, berupa reaksi orang dan norma. Para sosiolog mendefinisikan stigma sebagai serangkaian persepsi dan stereotip negatif spesifik yang melekat pada suatu label (Link dan Phelan, 2001), yang dapat terlihat dan disebarkan melalui media massa atau interaksi sehari-hari antar individu.⁹ Goffman (1963) menggambarkan stigma sebagai "atribut, perilaku, atau reputasi yang secara sosial mendiskreditkan dengan cara tertentu," merusak citra dan melemparkan para aktor yang ditandai dengan itu ke pinggiran masyarakat. Stigma itu berasal dari masyarakat, masyarakat memberikan stigma kepada orang yang melanggar norma sosial. Masyarakat memberikan identitas khusus bagi orang yang melanggar norma sosial, kemudian mereka membedakan dalam kelompok terstigma dan kelompok normal dalam masyarakat.¹⁰

Mengacu pada konsep pemikiran Goffmann, Link & Phelan (2001), merumuskan beberapa komponen dari stigmatisasi¹¹, yaitu:

1. *Labelling* merupakan pembedaan atau pemberian cap berdasarkan kategori atau perbedaan yang dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. *Labelling* dapat terjadi pada siapa saja terlebih pada anggota

⁹ Nickerson, Charlotte. (2011). *Labeling Theory of Deviance in Sociology: Definitions & Examples*. Diambil dari <https://www.simplypsychology-org.translate.google/labeling-theory.html>.

Bedakan dengan definisi Goffman bahwa stigma adalah "situasi individu yang didiskualifikasi dari penerimaan sosial" (Goffman, 1963, hlm. i). Orang yang terstigma memiliki "identitas yang rusak", yang berarti persona publik, atau diri, seseorang, tidak pernah atau tidak lagi diterima sebagai anggota sosial penuh yang memenuhi syarat oleh para penstigma, yang ia sebut "orang normal".

Goffman mengatakan bahwa kita memberikan informasi tentang diri kita sendiri ketika bertemu orang lain, yang disebut "informasi sosial", dan kita kurang lebih terbuka tentang apa yang akan kita ungkapkan ketika bertemu orang lain, tergantung pada apakah kita berpikir mereka mungkin menstigmatisasi kita atau tidak. Lebih lanjut, ketika kita bertemu orang asing, kita harus mengkategorikan mereka berdasarkan penampilan pertama dan mencoba mencari tahu ke dalam kategori mana kita akan menempatkan orang tersebut; ini disebut "identitas sosial".

Karakteristik tertentu diasumsikan tentang orang asing tersebut ketika kita bertemu, yang disebut "identitas sosial virtual". Terakhir, ada karakteristik aktual dari orang tersebut, dan ini disebut "identitas sosial aktual". Perbedaan antara identitas sosial virtual dan nyata terletak pada ruang stigma. Karena orang-orang begitu menyadari implikasi negatif stigma, mereka sering menyembunyikan informasi dari orang lain, dan ini disebut "identitas tersembunyi".

¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) stigma yaitu ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Menurut *Surgeon General Satcher's* (dalam Teresa, 2010) stigma adalah kejadian atau fenomena yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan perhatian, mengurangi seseorang untuk memperoleh peluang dan interaksi sosial. Dalam kamus psikologi, stigma adalah suatu tanda atau ciri pada tubuh atau satu cacat atau cela pada karakter seseorang.

¹¹ Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. *Annual review of Sociology*, 27(1), 363-385.

masyarakat yang dianggap berbeda atau menyimpang dari standar normalitas satu kelompok seperti pelacur atau pekerja malam.

2. *Stereotype* memiliki definisi yang mirip dengan *labelling* tetapi terdapat perbedaan fundamental. Jika *labelling* hanya memberi label atau cap seseorang berdasarkan aktivitas atau aib yang pernah terkait dengan dirinya, maka *stereotyping* merupakan penggolongan orang tersebut merupakan bagian dari kelompok tertentu yang dianggap buruk oleh standar umum.
3. *Separation* adalah proses stigma yang terjadi ketika label sosial menjadi pemisah “kita” (kelompok yang memberikan stigma) dari “mereka” (kelompok penerima stigma yang dianggap berbeda). Label ini diberikan untuk memisahkan pemberi dan penerima stigma. Hubungan label dengan atribut negatif akan menjadi pembenaran ketika seseorang penerima label mempercayai bahwa dirinya memang berbeda dengan mereka (Link & Phelan, 2001). Efek dari pemisahan ini pada objek stigma adalah perasaan diasingkan dan disingkirkan, yang mana hal tersebut merupakan indikator proses *labelling* dan *stereotyping*.
4. *Discrimination* adalah perilaku pemberian label yang menyebabkan penerima label kehilangan status dalam kelompok sosial dengan perilaku negatif (Link & Phelan, 2001).

Pelacuran di Desa Dukuhseti

Tidak diketahui kapan tepatnya pelacuran mulai berkembang di Desa Dukuhseti. Pelacuran di desa tersebut acapkali dikaitkan dengan cerita rakyat tentang kutukan sang pendiri desa, Mbah Brojoseti Singo Barong. Konon, demi mengetahui dan menangkap basah perselingkuhan sang istri, Nyi Dukuh, dengan musuh bebuyutannya, Ki Gede Tuwalang, Mbah Brojoseti murka. Dia menyumpah istri dan anak turun warga Dukuhseti akan selalu berbuat serong (berselingkuh).

Boleh jadi cerita itu hanya untuk membenarkan perbuatan pelacuran. Penelitian Koentjoro tahun 1989 menyimpulkan bahwa budaya merupakan faktor yang sangat menentukan pelacuran di Dukuhseti, yakni kepercayaan yang dibangun dengan legenda.¹² Masyarakat bersikap sangat longgar sejauh menyangkut hubungan seks. Pekerjaan melacur dianggap sebagai “suratan takdir”.

Merujuk fakta bahwa pelacuran berkembang di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik perdagangan, industri, maupun pelabuhan, kunjungan pekerja migran Tiongkok di kota-kota pantai utara Jawa pada abad ke-15, mungkin awal transaksi seks berkembang. Pada tahun 1416, diketahui pedagang-pedagang Tiongkok singgah di Pelabuhan Juwana. Jarak Pelabuhan Juwana dengan Dukuhseti tidaklah jauh.

Pekerja migran lain adalah orang-orang Portugis. Portugis tidak membangun koloni namun terdapat kerjasama antara Portugis dan Kerajaan Mataram untuk membangun benteng di Jepara pada tahun 1632. Antara Benteng Portugis (Desa Banyumanis, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara) dan Desa Dukuhseti hanya berjarak sekitar 16,8 km. Selain orang-orang Portugis, para pekerja benteng bermukim lama dan banyak berhubungan dengan wanita-wanita di Desa Dukuhseti dan Puncel. Mereka tinggal dan ada pula yang menikahi wanita-wanita setempat.

Selain pekerja migran manca negara, juga banyak pekerja migran yang berasal dari daerah lain seiring pendirian Pabrik Gula Trangkil, perkebunan tebu, karet, dan perkebunan jati di sekitar wilayah Dukuhseti pada tahun 1870. Konon, para pekerja dari luar daerah tersebut memberi kesempatan perempuan setempat mendapatkan uang melalui praktek pelacuran.¹³

¹² Soeriwidjaja, Ahmed K. dan Margono, Aries. *Jika Wanita Diibaratkan Sepetak*. Diambil dari <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1989/08/26/PRK/mbm.19890826.PRK21158.id.html>

¹³ Adelaide Worcester dalam buku “Pelacuran dalam Konteks Budaya” meyakini bahwa pelacuran di Dukuhseti bermula dari masa kolonial Hindia-Belanda.

Studi-studi terdahulu menyebut pelacuran di Dukuhseti berkembang tahun 1972. Tahun 1971, kali pertama pemilu Orde Baru, sebuah partai politik menggelar kampanye di Kabupaten Pati. Pejabat-pejabat kabupaten meminta para gadis Dukuhseti menjadi pagar ayu¹⁴ pada acara tersebut. Rupanya gadis-gadis itu dijadikan “umpan” Kepala Desa untuk menemani pejabat-pejabat yang datang dan berkampanye. Tidak diketahui bagaimana prosesnya, pada akhirnya gadis-gadis tersebut menjadi pelacur. Konon, istri dan putri Kepala Desa pun ikut bekerja sebagai pelacur dan bisa melayani permintaan jasa.

Sejak peristiwa itu, perempuan pelacur Dukuhseti makin dikenal dan dicari para pejabat dan laki-laki hidung belang dari Jakarta dan daerah lain. Dalam catatan Wildani Aulia, periode tahun 1973-1975 merupakan puncaknya.¹⁵ Pada tahun itu, permintaan layanan seks perempuan Dukuhseti sangat besar. Banyak keluarga secara tiba-tiba meningkat taraf hidupnya karena anak perempuan mereka masuk di bisnis pelacuran. Tahun 1975, berdirilah lokalisasi pelacuran.¹⁶

Sepanjang tahun 1989-1995, pelacuran di Desa Dukuhseti menyusut menyusul gerakan masyarakat. Sejumlah warga risau dengan citra buruk desa, khawatir dampak dan resiko pelacuran. Mereka bergerak dan mengambil peran moral dengan berbagai tindakan. Warga menyebutnya gerakan moralisasi. Gerakan itu merupakan tindakan berani dan beresiko,¹⁷ yang berhasil menutup seluruh tiga lokalisasi pelacuran. Lokalisasi terakhir yang ditutup tahun 2003 berada di Dukuh Purbo.¹⁸

Para pelacur tak kehilangan akal melanjutkan bisnis seks itu. Mereka melayani pelanggan di rumah. Kurang lebih ada 20-an rumah yang menjadi lokasi prostitusi rumahan itu. Masyarakat menggunakan istilah “pelacuran sandal”, merujuk pada kebiasaan tamu melepas sandal di depan pintu sebelum memasuki rumah. Kalau ada sandal di depan pintu berarti sang istri pemilik rumah sedang menerima pelanggan atau tamu hidung belang. Sang suami dan anaknya memaklumi dengan menyingkir atau pergi dari rumah.¹⁹

Pelacuran rumahan kembali memancing keresahan dan kemarahan warga, apalagi dilakukan secara terbuka. Tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama dibantu aktivis pemuda kembali melakukan berbagai tindakan untuk menghentikan bisnis seks itu. Tindakan mereka cukup efektif hingga prostitusi rumahan berhasil dihilangkan sejak sekitar tahun 2003.

Sampai tahun 2015, masih dapat ditemukan pekerja seks dengan modus terselubung dan sembunyi-sembunyi. Sebagian beroperasi di luar kota hingga saat ini. Mereka kembali desa pada waktu-waktu

¹⁴ Gadis-gadis yang membentuk barisan pagar betis dalam upacara adat Jawa, seperti pada prosesi cucuk lampah dalam pernikahan, bertugas menjadi pengawal pengantin dengan peran melindungi dan mengiringi mempelai menuju pelaminan. Mereka adalah remaja di barisan setelah gadis kecil “patah sakembaran” dan sebelum pasangan pengantin, yang memiliki fungsi simbolis mengusir bala dan energi negatif, serta menunjukkan penghormatan kepada pengantin yang dianggap sebagai raja dan ratu sehari.

¹⁵ Aulia, Wildani. (2020). *Dukuhseti: Dari Kampung Simpanan Menjadi Kampung Beriman* (1972-2016).

¹⁶ Lokalisasi pelacuran di Desa Dukuhseti terdapat di tiga tempat, yakni di Dukuh Seti, Dukuh Oro-Oro Tengah, dan Dukuh Purbo. Lokasi pelacuran di Dukuh Seti dan Dukuh Oro-Oro Tengah berada di tengah-tengah permukiman masyarakat sedang lokasi prostitusi di Dukuh Purbo sudah keluar dari permukiman masyarakat walaupun jaraknya sangat dekat. Lokalisasi Purbo terletak di pinggir pantai dan di tengah-tengah tambak, yang kebanyakan pekerja seks datang dari luar daerah Pati.

¹⁷ Lokalisasi pelacuran membuat premanisme berkembang di Dukuhseti. Karena itu Dukuhseti dikenal dengan Desa Pelacur dan Desa Preman.

¹⁸ Berdiri sejak 1980, lokalisasi Purbo berupa rumah besar yang terdiri dari beberapa kamar dan terdapat mucikari di dalamnya, terletak di antara Dukuh Selempung dan Dukuh Banyutowo.

¹⁹ Fenomena ini yang mengagetkan banyak pihak bahwa sang suami mengetahui pekerjaan istri dengan bahkan menjadikan istri sebagai komoditas, alat produksi. Adakalanya, sang suami menjadi manajer yang menjalankan peran menawarkan (*marketing*), mengatur transaksi, dan mengelola keuangan.

tertentu, seperti pada lebaran Idul Fitri dan jika ada keperluan keluarga. Sebagian dari mereka sudah tak lagi menjalani profesi karena usia.

Pelabelan dan Stigma Menyimpang

Label desa pelacur, kampung pelacur, atau kampung simpanan diberikan pada Desa Dukuhseti dalam waktu cukup panjang. Tidak diketahui awalnya tapi paling masuk akal pelabelan itu terjadi ketika popularitas tempat-tempat pelacuran Desa Dukuhseti meningkat. Berdirinya lokalisasi pelacuran di tiga dukuh tahun 1975 menjadi monumen pelabelan itu. Informasi soal latar budaya yang mendukung, sikap permisif warga, modus pelacuran rumahan, dan lain-lain menjadi perekat label.

Jika awalnya tersebar terbatas dari mulut ke mulut di desa sekitar, label itu kemudian dikonstruksi sedemikian rupa oleh media massa. Pada tahun 1989, *Majalah Sarinah* dan *Majalah Tempo*, misalnya, menayangkan liputan terkait desa Dukuhseti dengan judul “Bila Wanita Diibaratkan Sepetak Sawah”. Dalam arsip berita edisi 26 Agustus 1989, ditonjolkan dua temuan penelitian Koentjoro dari UGM. *Pertama*, 70 persen (dari 178 responden) remaja perempuan di Dukuhseti mengaku suka dengan profesi melacur. *Kedua*, 80 persen (dari 228 responden) orang tua mengungkapkan bahwa penyangga ekonomi keluarga adalah anak perempuan mereka. “Anak perempuan diibaratkan sepetak sawah. Semakin cantik si gadis, semakin luas sawahnya. Dengan kata lain, perempuan menyandang nilai ekonomis,” tulis *Tempo* dalam laporannya.²⁰

Tampilan media massa yang merepresentasikan label desa pelacur membentuk dan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang hal itu. Yang dilakukan media massa dalam mengkonstruksikan teori labeling ini adalah dengan mendramatisasi penayangan atau informasi dengan menciptakan karakter perilaku menyimpang yang harus ditakuti sehingga berperan aktif dalam menyebarkan label yang menstigma.

Tentu media massa memegang peran sangat penting dalam pembentukan opini, apalagi media massa nasional sekelas *Sarinah* dan *Tempo*²¹. Media itu memimpin pembentukan opini sehingga berita media itu mempengaruhi persepsi masyarakat. Berita *Sarinah*, *Tempo*, dan media massa lain tidak hanya melibatkan labeling pada perilaku menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma, namun juga merefleksikan stereotipe dan stigmatisasi pada pelaku penyimpangan sekaligus warga atau masyarakat Dukuhseti, termasuk warga perempuan, remaja, dan anak-anak bukan pelacur yang memegang norma sosial dan ajaran agama.

Pengertian pelacuran²² sejatinya tidak sesederhana definisi yang menekankan tiga unsur: pembayaran, promiskuitas,²³ dan ketidakacuhan emosional. Di luar faktor ekonomi, pelacuran sesungguhnya adalah

²⁰ Soeriwidjaja, Ahmed K. dan Aries Margono. Jika Wanita Diibaratkan Sepetak. Diambil dari <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1989/08/26/PRK/mbm.19890826.PRK21158.id.html>

²¹ Kedua majalah ini merupakan bacaan bergengsi pada masanya. Majalah *Sarinah* adalah majalah mingguan yang dibaca para wanita dan keluarga Indonesia, yang memilih bacaan berselera wanita dan keluarga. Pada tahun 1989, *Tempo* merupakan media massa *mainstream* dalam format majalah, dengan oplah tertinggi antara 12.000 sampai 15.000 eksemplar per pekan, yang dibaca oleh masyarakat Indonesia berpendidikan, umumnya memiliki minat pada berita politik, sosial dan budaya. *Tempo* juga menjadi rujukan para pembuat kebijakan.

²² *Encyclopaedia Britannica* (dalam Truong, 1992:15) menjelaskan pelacuran atau praktik seksual dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan hubungan seksual yang singkat dan tidak melibatkan komitmen secara emosional, yang kurang lebih dilakukan dengan banyak orang dan tidak terbatas pada satu pasangan (promiskuitas), dengan imbalan uang atau barang. Dengan demikian pelacuran dikarakteristikan oleh tiga unsur utama, yaitu: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional. Selain itu, ditekankan lagi bahwa adanya elemen promiskuitas menunjukkan asumsi bahwa hubungan seksual dianggap dan diterima secara moral hanya di dalam batas-batas hubungan yang secara sosial. Begitupun elemen pembayaran dan ketidakacuhan emosional merefleksikan asumsi bahwa hubungan seksual dalam jejaring-jejaring yang diterima secara sosial adalah bebas dari

ekspresi dari hegemoni kultural pria atas kaum perempuan. Dalam banyak hal juga dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya, bertali-temali dengan faktor lain, seperti kemiskinan, kebiasaan kawin muda, kebiasaan cerai, dan status sosial perempuan yang relatif rendah juga merupakan faktor pendorong kenapa perempuan melacurkan diri.

Di Dukuhseti tahun 1970-an sampai medio 1990-an, fenomena itu dapat ditemukan. Pelacuran rumahan atau pelacuran sandal, sejatinya menjadikan perempuan sebagai alat produksi (ekonomi). Hegemoni semakin nampak pada kasus suami menawarkan kepada calon pelanggan atau mengantar sang istri ke lokasi prostitusi. Di sisi lain, terdapat hegemoni orangtua atas anak-anaknya. Ada orangtua yang mengizinkan atau paling tidak membiarkan anaknya menjadi pelacur.²⁴ Artinya, pada saat itu ada individu yang sadar menjajakan diri sebagai pelacur –sebagaimana temuan Koenjoro– tetapi tak sedikit yang dieksploitasi sebagai alat reproduksi dan alat produksi. Mereka terpaksa menjalani pekerjaan penjaja seks.

Label pelacur bersifat individual tetapi ketika dilekatkan pada desa menjadi desa pelacur berarti label itu menstigma komunitas²⁵ desa. Pelabelan itu merupakan pelabelan menyimpang dan bersifat menstigmatisasi. Terlalu banyak warga Dukuhseti terstigmatisasi padahal mereka bukan pelacur atau pekerja seks. Mereka setia dengan norma sosial dan berpegang pada ajaran agama. Stigma tersebut sangat merugikan. Label dan stigma itu bahkan menciptakan stigma berulang dan akumulatif berupa stigma anak haram, anak jadah, dan anak pelacur bagi remaja dan anak-anak. Ini ungkapan kasar (baca: tidak sopan) yang sangat diskriminatif, merusak karakter dan kepribadian remaja, anak-anak dan bahkan orangtua, khususnya, ibu.

Pada tingkat komunitas, label dan stigma desa pelacur jelas merupakan label yang merusak atau mengaburkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Bahkan orang atau warga yang tak melakukan penyimpangan pun terkena dampak stigmatisasi berupa diskriminasi. Hal tersebut menimbulkan gangguan keseimbangan sosial, menciptakan situasi anomie, dan disorientasi sosial.

Dalam waktu yang cukup lama tahun 1970-1990-an, sangat jarang pernikahan perempuan Dukuhseti dengan pria dari desa-desa sekitar atau wilayah lain. Banyak lelaki dari desa-desa sekitar menghindari untuk menikahi perempuan Dukuhseti sebagai pasangan dengan alasan larangan orangtua, mahar yang tinggi, sampai khawatir bagian dari keluarga pelacur. Kebanyakan pernikahan terjadi antarsesama warga Dukuhseti atau pria dari Dukuhseti menikahi mempelai perempuan dari desa-desa sekitar.

Fenomena itu berkurang seiring berjalannya waktu. Mulai awal tahun 2000-an, perkawinan perempuan Dukuhseti dengan lelaki dari desa-desa sekitar dan daerah lain semakin banyak seiring kembalinya remaja dan perempuan Desa Dukuhseti yang merantau ke luar desa dan luar daerah, baik untuk bekerja maupun

pembayaran dan melibatkan ikatan secara emosional. Maka kedua asumsi ini perlu ditinjau kembali sebab keduanya tidak dapat diterapkan di berbagai situasi.

²³ Perilaku seksual yang melibatkan aktivitas seksual dengan banyak atau lebih dari satu pasangan, tanpa didasari ikatan pernikahan dan tanpa membatasi pada satu pasangan saja. Istilah ini dapat membawa penilaian moral tertentu karena norma sosial menganjurkan hubungan monogami. Contoh perilaku yang dikaitkan dengan promiskuitas adalah cinta satu malam (*one-night stand*)

²⁴ Data penelitian Koentjoro menunjukkan 80 persen (dari 228 responden) orang tua mengungkapkan bahwa penyangga ekonomi keluarga adalah anak perempuan mereka. “Anak perempuan diibaratkan sepetak sawah. Semakin cantik si gadis, semakin luas sawahnya. Dengan kata lain, perempuan menyandang nilai ekonomis,” tulis *Tempo* dalam laporannya. Dalam arsip berita edisi 26 Agustus 1989.

²⁵ Istilah 'komunitas' dapat dipahami dengan berbagai cara. Secara umum, komunitas dapat dipahami sebagai sekelompok orang yang memiliki kesamaan karakteristik atau tujuan dan komunitas sebagai entitas geografis, seperti desa. Komunitas yang terdiri dari orang-orang yang tinggal di wilayah geografis yang sama dapat terdiri dari berbagai subkelompok, yang semuanya dapat ditargetkan untuk intervensi tertentu. Subkelompok yang dapat didefinisikan misalnya, keluarga, tetangga, pemuda, anak sekolah, tokoh masyarakat, kelompok agama, polisi, dukun, organisasi berbasis komunitas, dan organisasi berbasis agama.

menempuh pendidikan.²⁶ Sebenarnya urusan pernikahan bukan tujuan utama merantau. Mereka memang berpotensi dan berniat mengembangkan potensi yang secara otomatis menghindari dan mengikis efek stigma desa pelacur.

Hal itu membenarkan pandangan Goffman bahwa interaksi yang tidak nyaman dan ambigu antara orang-orang yang diberi label “menentang” dan “tidak menyimpang” dapat “menyebabkan orang-orang normal dan mereka yang terstigma memilih untuk hidup dengan tujuan menghindari label tersebut” (Goffman, 1963). Stigma merupakan sekumpulan keyakinan negatif dan kita tidak selalu dapat mengendalikannya. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap stigma dengan menolak label diri atau stigma diri.

Gerakan Moralisasi

Link (1982) mengusulkan dua proses pengucilan sosial di antara mereka yang diberi label menyimpang: penolakan atau devaluasi orang menyimpang oleh masyarakat dan pihak berwenang dan kedua, orang yang diberi label dapat mengharapkan penolakan dan devaluasi, yang mengarah pada penarikan sosial. Namun terhadap label yang menstigmatisasi berupa desa pelacur, proposal itu tidak cukup. Satu-satunya cara untuk menghilangkan label dan stigma desa pelacur harus menghilangkan pelacuran.

Tindakan warga Dukuhseti yang menutup atau membubarkan lokalisasi di tiga dukuh merupakan cara untuk melepaskan stigma desa pelacur. Warga menyebutnya gerakan moralisasi.²⁷ Gerakan itu merupakan tindakan berani dan beresiko antara lain karena berhadapan dengan preman-preman, yang diuntungkan dengan keberadaan bisnis seks tersebut.²⁸ Selama ketiga lokalisasi pelacuran beroperasi para preman sering kali menjadi “penguasa” atau “pelindung” untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, yang juga melibatkan kekerasan dan eksploitasi.

Gerakan moralisasi dapat merujuk pada inisiatif yang mendorong penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Gerakan moralisasi bertujuan untuk meningkatkan dan menegakkan nilai-nilai moral dan etika dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam bidang pekerjaan, pendidikan, sosial, atau pemerintahan. Dengan demikian, gerakan moralisasi di Dukuhseti melampaui target menutup pelacuran, dengan tujuan: (1) Menciptakan masyarakat Dukuhseti yang lebih berintegritas dan beretika; (2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan; Dan (3) mengembalikan dan membangun kembali jati diri dan nilai-nilai luhur warga Dukuhseti.

Pada kenyataannya gerakan moralisasi dengan menutup lokalisasi pelacuran tidak serta merta melepas label dan stigma desa pelacur karena model pelacuran bergeser menjadi pelacuran rumahan atau pelacuran sandal. Semakin lama, pelacuran rumahan pun semakin terbuka. Kesadaran atas pengaruh buruk pelacuran rumahan menggerakkan tokoh agama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), tokoh masyarakat, dan pemuda, terutama Anshor, meneruskan gerakan moralisasi²⁹ dengan disertai langkah-langkah pembinaan berkelanjutan.

²⁶ Ini juga semakin terbukanya wawasan masyarakat bahwa banyak pula perempuan Desa Dukuh Seti yang memegang teguh norma agama dan sosial.

²⁷ Istilah ini juga dapat berarti proses di mana sebuah preferensi menjadi nilai, yang diperkenalkan oleh psikolog Paul Rozin, atau gerakan moral yang lebih luas seperti upaya menegakkan kebenaran dan keadilan seperti yang dicontohkan oleh gerakan Mahatma Gandhi dan Martin Luther King Jr.

²⁸ Sebuah studi menunjukkan, hubungan antara lokalisasi pelacuran dan premanisme adalah keterkaitan erat dalam bentuk praktik kejahatan yang terorganisir, di mana preman sering kali menjadi “penguasa” atau “pelindung” lokalisasi pelacuran untuk mendapatkan keuntungan, yang juga melibatkan kekerasan dan eksploitasi terhadap para pekerja seks komersial (PSK). Dalam konteks ini, premanisme bertindak sebagai sistem kontrol yang menjaga kelangsungan lokalisasi dan melindungi praktik pelacuran dari penertiban hukum, sehingga mereka menjadi bagian dari jaringan kejahatan yang lebih besar.

²⁹ Gerakan moralisasi di Dukuhseti ini diketuai oleh Asmawi Hasan, bekerjasama dengan tokoh agama (ustadz dan ustadzah), tokoh masyarakat, dan pemuda.

Gerakan itu dijalankan dengan melakukan *treatment* terhadap pembeli dan penaja seks. Warga rutin berjaga dan melakukan razia di jalan-jalan dan sudut desa dengan sasaran pada penikmat seks. Mereka mengusir sampai akses keluar desa. Penjagaan dan razia secara rutin cukup menjadikan penikmat seks jera datang ke Dukuhseti. Warga juga rutin memantau rumah-rumah yang dipakai sebagai tempat prostitusi dan menegur secara langsung dan terbuka jika menemui orang-orang yang dicurigai terlibat dalam transaksi seks. Pada saat bersamaan tokoh-tokoh agama rutin melakukan bimbingan secara individu dan kelompok, menggelar pengajian rutin yang mengundang dan melibatkan pekerja seks, mucikari, dan keluarganya. Mereka berusaha mendorong kesadaran untuk meninggalkan menutup pelacuran dan meninggalkan pekerjaan tersebut dengan pendekatan dari hati ke hati dan silaturahmi dari rumah ke rumah.

Gerakan moralisasi tahap kedua dilakukan dalam waktu cukup lama, berkelanjutan (*sustainable*), dan juga melibatkan aparat pemerintah. Tidak cukup dengan pengajian dan dakwah, gerakan moralisasi (terhadap prostitusi rumahan) juga mendorong peningkatan ekonomi atau memberikan solusi kemungkinan beralih profesi bagi para pekerja seks dengan wirausaha, diantaranya dengan pendidikan memasak, pelatihan keterampilan baki lamaran, dan usaha batok tempurung di Dukuh Selempung.

Gerakan moralisasi pertama (terhadap lokalisasi prostitusi) dilanjutkan gerakan moralisasi kedua (terhadap prostitusi rumahan) pada akhirnya mampu melepaskan Dukuhseti dari label dan stigma desa pelacur. Label desa pelacur, kampung pelacur, atau kampung simpanan sudah terlepas dari Dukuhseti. Wildan Aulia (2020) menggambarkan Dukuhseti sebagai desa beriman. Kalau data penelitian Koentjoro (1989) menemukan 70 persen (dari 178 responden) remaja perempuan di Dukuhseti mengaku suka dengan profesi melacur, penelitian lain hanya menemui satu dari 10 orang remaja yang mengetahui label dan stigma desa pelacur, saat ini tidak seorangpun remaja bercita-cita menjadi pelacur dan tidak mengenali label dan stigma itu meski sebagian mengetahui cerita tentang pelacuran itu.

Sebagaimana warga desa umumnya, warga Dukuhseti memiliki norma sosial dan menjaga adat istiadat. Selain ramah, sopan, tulus, mereka bahkan bisa disebut agamis. Sewajarnya desa, ada tapi sangat sedikit yang melakukan penyimpangan sosial.³⁰ Hampir semuanya masyarakat Dukuhseti menganut *ahlisunnah wal jamaah*. Banyaknya masyarakat yang menganut organisasi NU bisa jadi disebabkan karena letak geografis desa Dukuhseti yang berdekatan dengan desa-desa yang melahirkan kiai-kiai NU seperti desa Tayu, Kajen dan Guyangan.³¹ Sebagai organisasi, NU berkembang begitu pesat di Dukuhseti.

Transformasi Dukuhseti menjadikannya desa transisional dengan dinamika khusus. Interaksi sosial masyarakatnya intensif tetapi mobilitas sosial masyarakat relatif rendah. Jenis pekerjaan relatif beragam tetapi ikatan masyarakat yang terbatas. Solidaritas sosial pada masyarakat pedesaan sangat kuat tetapi kontrol sosial masyarakat pedesaan dilakukan lewat norma dan nilai fluktuatif

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pelepasan label dan stigma desa pelacur dari Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dengan fokus strategi masyarakat menghadapi dan melepaskan

³⁰ Beberapa penelitian terdahulu meyakinkan bahwa Desa Dukuhseti, *Dari Kampung Simpanan Hingga Kampung Beriman: Sejarah Kampung Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati Tahun 1972-2016* (2020); Irmayani, "Pembentukan Perilaku Pelacuran Berlatar Tradisi di Kabupaten Pati dan Jepara, Jawa Tengah," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial* vol.11, No.1 (2006); Nurviyanti, "*Strategi Dakwah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Dampak Prostitusi* (Studi Kasus Di Dukuh Selempung Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)" (Skripsi, 2015); Adelaide Worcester tahun 2002 yang berjudul *Pelacuran Dalam Konteks Budaya*.

³¹ NU di desa Dukuhseti memang begitu banyak. Banyaknya masyarakat yang menganut organisasi NU bisa jadi disebabkan karena letak geografis desa Dukuhseti yang berdekatan dengan desa-desa yang melahirkan kiai-kiai NU seperti desa Tayu, Kajen dan Guyangan.

stigma. Label dan stigma desa pelacur merusak citra, karakter, dan kepribadian warga, khususnya warga perempuan, remaja, dan anak-anak.

Dari penelitian diketahui pelacuran di Desa Dukuhseti terjadi dan berkembang sejak lama yang dipengaruhi berbagai faktor, seperti budaya, sistem sosial, ekonomi, dan letak geografi. Pelacur dapat dikelompokkan menjadi pekerja seks dan perdagangan seks. Perdagangan seks terjadi karena hegemoni pria atas perempuan dan relasi paternalistik.

Lahirnya stigma negatif karena label yang menyimpang. Pelacuran sempat berkembang tapi tidak semua warga (perempuan) menjadi pelacur dan diuntungkan pelacuran. Label dan stigma desa pelacur menyebabkan diskriminasi dan penarikan jarak terhadap perempuan Dukuhseti, terlebih remaja dan anak-anak. Remaja dan anak-anak mendapat stigma baru sebagai anak haram, anak jadah, dan anak pelacur. Sebagian beradaptasi dengan menyingkir atau merantau ke luar kota.

Tidak ada cara untuk menghilangkan label dan stigma desa pelacur selain menghilangkan pelacuran. Pelepasan stigma pada tahap awal dilakukan menutup lokalisasi pelacuran di tiga dukuh dalam waktu tahunan, yang disebut warga dengan gerakan moralisasi. Gerakan moralisasi berlanjut dalam waktu yang tidak kalah lama dan masalah yang kompleks, dengan menutup tempat pelacuran rumahan dan mempersempit akses pelanggan atau penikmat seks dengan pengawasan dan razia rutin. Tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan pemuda melakukan gerakan berkelanjutan dengan langkah-langkah pendekatan dari hati ke hati, dakwah, bimbingan individu dan kelompok, pengajian rutin bagi pelacur, keluarga dan mucikari. Selain itu, mereka melakukan pemberdayaan ekonomi dengan pelatihan berbagai ketrampilan wirausaha. Peran tokoh-tokoh agama (NU), tokoh masyarakat, dan pemuda (Ansor) sangat penting, dengan menggandeng aparat pemerintahan.

Kelemahan penelitian ini tidak memotret dinamika pelacuran, yakni memahami lebih dalam motif pelacur yang pekerja seks dan akibat perdagangan seks. Perdagangan seks merujuk pada perempuan pekerja seks yang bekerja akibat relasi paternalistik dan hegemoni suami. Ke depan perlu studi yang membedakannya sekaligus cara mereka terbebas dari dunia pelacuran. Penelitian juga tidak mengeksplorasi pergeseran atau perubahan label dan stigma dari desa pelacur menjadi desa beriman untuk Dukuhseti.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Dadi dan Nur Aini H, Aliyah. *Teori Penjulukan*. Media.Tor, Vol 6.No.2 Desember 2005
Media.neliti.com/media/publications/156800-ID-teori-penjulukan.pdf
- Aulia, Wildani. (2020). Dukuhseti: *Dari Kampung Simpanan Menjadi Kampung Beriman* (1972-2016).
- Azizah. 2020. "Stigma Masyarakat Terhadap Keluarga Yang Memiliki Anak Hamil Di Luar Nikah Di Negari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar." Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Program Studi Sosiologi. Universitas Andalas
- Becker, Howard. (1963). *Outsiders: Studies in Sociology of Deviance*. New York: The Free Press.
- Candra Irawati, Arista. *Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*; Rampai Jurnal Hukum Volume 1 No 1 April 2022)
- Irmayani. (2006). "Pembentukan Perilaku Pelacuran Berlatar Tradisi di Kabupaten Pati dan Jepara, Jawa Tengah," Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial vol.11, No.1 (2006);
- Lemert, Edwin. (1967). *Human Deviance, Social Problems and Social Control*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. *Annual review of Sociology*, 27(1)
- Nickerson, Charlotte. (2011). *Labeling Theory of Deviance in Sociology: Definitions & Examples*. Diambil dari <https://www.simplypsychology-org.translate.goog/labeling-theory.html>.
-

Nurviyanti. (2015). “*Strategi Dakwah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Dampak Prostitusi* (Studi Kasus di Dukuh Selempung Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)”. Skripsi, 2015.

Soeriwidjaja, Ahmed K. dan Aries Margono. Jika Wanita Diibaratkan Sepetak. Diambil dari <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1989/08/26/PRK/mbm.19890826.PRK21158.id.html>

Sunarto, Kumanto. (2004). *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)
